

DUNIA YANG BERGESER: KAJIAN EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

1 GEOPOLITIK



- rivalitas
- konflik
- blok baru

2 EKONOMI GLOBAL



- perlambatan
- inflasi
- utang



3 PERDAGANGAN



- fragmentasi
- rantai pasok
- proteksionisme

4 TEKNOLOGI & AI



- otomasi
- data
- produktivitas



5 ENERGI & IKLIM



- transisi
- ESG
- mineral kritis



6 DEMOKRASI & TATA KELOLA



- populisme
- kepercayaan
- akuntabilitas



7 MASYARAKAT



- kelas menengah
- ketimpangan
- kontrak sosial



8 INDONESIA & ASEAN



DARI GLOBALISASI
KE KETAHANAN



DARI EFISIENSI
KE RESILIENSI



DARI DISRUPSI
KE TRANSFORMASI



Rudy C Tarumingkeng: Dunia yang Bergeser -- Kajian Ekonomi dan Politik Kontemporer

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

12 Juni 2026

DUNIA YANG BERGESER: KAJIAN EKONOMI DAN POLITIK KONTEMPORER

Abstrak

Artikel ini mengkaji pergeseran ekonomi dan politik kontemporer dalam konteks dunia yang semakin ditandai oleh ketidakpastian, fragmentasi, rivalitas geopolitik, transformasi teknologi, tekanan fiskal, transisi energi, dan perubahan kualitas demokrasi. Dunia pasca-pandemi tidak kembali ke pola lama globalisasi liberal yang bertumpu pada perdagangan bebas, rantai pasok efisien, stabilitas moneter, dan optimisme terhadap integrasi pasar. Sebaliknya, ekonomi global bergerak ke arah tatanan yang lebih rapuh: pertumbuhan melemah, inflasi kembali sensitif terhadap guncangan energi, perdagangan internasional makin dipengaruhi kepentingan keamanan nasional, dan negara kembali mengambil peran strategis dalam industri, teknologi, pangan, energi, serta keuangan. IMF pada April 2026 memperkirakan pertumbuhan global 2026 sebesar 3,1% dalam skenario konflik terbatas, sementara World Bank pada Juni 2026 memproyeksikan perlambatan lebih tajam ke 2,5% akibat guncangan energi dan ketegangan geopolitik. ([IMF](#))

Di bidang politik, kemunduran demokrasi, populisme, polarisasi sosial, disinformasi digital, serta menguatnya ekonomi politik proteksionis memperlihatkan bahwa krisis kontemporer bukan sekadar persoalan pasar, melainkan krisis tata kelola. Freedom House mencatat kebebasan global menurun untuk tahun ke-20 berturut-turut pada 2025, sedangkan V-Dem menunjukkan hanya 18 negara sedang mengalami demokratisasi pada 2026. ([Freedom House](#)) Artikel ini berargumen bahwa dunia sedang mengalami "pergeseran rezim": dari globalisasi efisiensi menuju globalisasi

ketahanan; dari negara minimal menuju negara strategis; dari pertumbuhan berbasis integrasi pasar menuju pertumbuhan berbasis kapasitas institusional, teknologi, energi bersih, dan legitimasi sosial. Bagi Indonesia, perubahan ini menghadirkan risiko sekaligus peluang: risiko tekanan nilai tukar, subsidi energi, arus modal keluar, serta ketidakpastian investor; tetapi juga peluang hilirisasi, ekonomi hijau, AI, ekonomi maritim, dan diplomasi ASEAN. Kesimpulannya, negara yang berhasil bukanlah yang paling tertutup atau paling terbuka, melainkan yang mampu membangun ketahanan ekonomi, akuntabilitas politik, kapasitas teknologi, dan keadilan sosial secara simultan.

Kata Kunci: *ekonomi politik kontemporer, globalisasi, geopolitik, demokrasi, AI, transisi energi, Indonesia, fragmentasi ekonomi, ketahanan nasional, tata kelola.*

1. Pendahuluan: Dunia yang Tidak Lagi Bergerak Linier

Dunia kontemporer sedang mengalami perubahan yang tidak dapat dipahami hanya sebagai siklus naik-turun ekonomi. Ia lebih tepat disebut sebagai pergeseran struktural. Pada masa setelah Perang Dingin, banyak negara percaya bahwa keterbukaan pasar, perdagangan bebas, arus modal global, dan demokratisasi akan bergerak searah. Globalisasi dianggap sebagai jalan menuju efisiensi, kemakmuran, dan stabilitas. Namun dua dekade terakhir memperlihatkan kenyataan yang lebih kompleks: krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, perang dan konflik regional, perubahan iklim, disrupsi teknologi digital, serta meningkatnya populisme telah mengguncang asumsi dasar tersebut.

Pergeseran ini tampak dalam beberapa gejala. Pertama, pertumbuhan ekonomi global tidak lagi sekuat era 1990-an dan awal 2000-an. Kedua,

perdagangan dunia tidak runtuh, tetapi kehilangan karakter “hiperglobalisasi” yang dahulu menekankan efisiensi biaya semata. WTO memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang dunia turun dari 4,6% pada 2025 menjadi 1,9% pada 2026 dalam skenario dasar, meskipun perdagangan barang terkait AI masih menjadi penopang penting. ([World Trade Organization](#)) Ketiga, negara kembali hadir sebagai aktor ekonomi strategis, bukan hanya regulator pasif. Keempat, demokrasi menghadapi tekanan dari polarisasi, disinformasi, ketimpangan, dan konsentrasi kekuasaan. Kelima, teknologi—terutama AI—menjadi sumber produktivitas baru sekaligus sumber ketimpangan baru.

Dunia yang bergeser ini menuntut cara berpikir ekonomi-politik yang lebih integratif. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik, sebab kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, energi, industri, dan teknologi selalu terkait dengan distribusi kekuasaan. Politik juga tidak dapat dipahami tanpa ekonomi, sebab legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada pekerjaan, harga pangan, daya beli, stabilitas mata uang, dan rasa keadilan sosial. Dengan demikian, kajian ekonomi dan politik kontemporer harus memadukan analisis makroekonomi, kelembagaan, geopolitik, demokrasi, teknologi, dan keberlanjutan.

2. Kerangka Teoretis: Ekonomi Politik sebagai Lensa Integratif

Ekonomi politik mempelajari hubungan antara kekuasaan, institusi, pasar, dan masyarakat. Dalam ekonomi neoklasik murni, pasar sering dipahami sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang bekerja melalui harga. Namun dalam ekonomi politik, harga tidak pernah netral sepenuhnya. Harga energi, nilai tukar, suku bunga, upah, tarif impor, dan harga pangan selalu dibentuk oleh struktur kekuasaan, regulasi, kepentingan korporasi, kebijakan negara, serta posisi suatu negara dalam sistem global.

Karl Polanyi dalam *The Great Transformation* menunjukkan bahwa pasar modern tidak muncul secara alamiah, melainkan dibentuk oleh negara dan

institusi. Ketika pasar bergerak terlalu jauh tanpa perlindungan sosial, masyarakat akan melakukan “gerakan balik” untuk menuntut regulasi, proteksi, dan keadilan. Pemikiran ini relevan untuk memahami bangkitnya populisme dan proteksionisme dewasa ini. Banyak masyarakat merasa bahwa globalisasi memberi keuntungan besar kepada korporasi, sektor finansial, dan kelompok berpendidikan tinggi, tetapi meninggalkan pekerja industri, petani kecil, kelas menengah bawah, dan wilayah pinggiran.

Douglass North menekankan bahwa institusi—aturan formal dan informal—menentukan kinerja ekonomi jangka panjang. Negara yang memiliki kepastian hukum, birokrasi efektif, akuntabilitas, perlindungan hak milik, dan kapasitas fiskal cenderung lebih mampu mengelola perubahan. Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2001) juga menunjukkan bahwa kualitas institusi berpengaruh besar terhadap perbedaan kemakmuran antarnegara. Dengan kata lain, pertumbuhan bukan hanya soal modal dan tenaga kerja, tetapi juga soal aturan main.

Dani Rodrik mengembangkan gagasan bahwa globalisasi, demokrasi nasional, dan kedaulatan negara tidak selalu dapat dimaksimalkan sekaligus. Dalam konteks sekarang, dilema itu terlihat jelas. Negara ingin tetap menikmati manfaat perdagangan global, tetapi juga ingin melindungi industri strategis, menjaga keamanan data, mengamankan pangan dan energi, serta mempertahankan legitimasi politik domestik. Karena itu, globalisasi masa depan kemungkinan bukan globalisasi tanpa batas, melainkan globalisasi yang dinegosiasikan kembali.

Farrell dan Newman (2019) memperkenalkan konsep *weaponized interdependence*, yaitu ketika saling ketergantungan ekonomi global dapat dijadikan instrumen kekuasaan. Negara yang menguasai jaringan keuangan, teknologi, energi, data, atau logistik dapat menggunakan posisi tersebut untuk menekan negara lain. Dalam dunia seperti ini, rantai pasok bukan hanya persoalan biaya produksi, tetapi juga persoalan keamanan nasional.

3. Lanskap Makroekonomi Global: Pertumbuhan Melemah, Risiko Meningkat

Ekonomi global pada 2026 berada dalam kondisi yang rapuh. IMF dalam *World Economic Outlook* April 2026 menyatakan bahwa ekonomi dunia kembali terganggu oleh konflik di Timur Tengah, kenaikan harga komoditas, ekspektasi inflasi yang lebih kuat, dan kondisi keuangan yang lebih ketat. Dalam asumsi konflik terbatas, IMF memproyeksikan pertumbuhan global 3,1% pada 2026 dan 3,2% pada 2027, lebih rendah dari rata-rata sebelum pandemi. ([IMF](#)) World Bank bahkan memberikan proyeksi yang lebih hati-hati: pertumbuhan global 2026 diperkirakan melambat ke 2,5%, sebelum membaik pada 2027–2028 apabila pasokan energi pulih dan perdagangan menguat. ([World Bank](#))

Perlambatan ini mencerminkan kombinasi faktor siklikal dan struktural. Faktor siklikal mencakup kenaikan harga energi, pelemahan permintaan global, inflasi, dan respons kebijakan moneter. Faktor struktural mencakup penuaan penduduk, produktivitas yang melambat, ketidakpastian kebijakan perdagangan, perubahan iklim, dan tekanan fiskal. OECD mencatat bahwa konflik Timur Tengah terjadi ketika ekonomi global relatif masih kuat pada akhir 2025 dan awal 2026, tetapi guncangan energi, penguatan dolar AS, dan kondisi keuangan yang lebih ketat menekan banyak negara berkembang. ([OECD](#))

Tekanan fiskal menjadi salah satu ciri utama ekonomi politik kontemporer. IMF Fiscal Monitor April 2026 mencatat utang publik global naik mendekati 94% PDB pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 100% PDB pada 2029. Beban ini terutama didorong oleh ekonomi besar, tetapi dampaknya dirasakan luas karena suku bunga tinggi meningkatkan biaya pembiayaan dan mempersempit ruang fiskal. ([IMF](#)) Situasi ini menciptakan dilema kebijakan: negara perlu membiayai pertahanan, subsidi, transisi energi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan investasi teknologi; tetapi pada saat yang sama harus menjaga kredibilitas fiskal.

Dalam konteks ini, stabilitas makroekonomi tidak dapat lagi dipahami sebagai sekadar inflasi rendah dan defisit terkendali. Stabilitas harus mencakup ketahanan terhadap guncangan energi, volatilitas nilai tukar, arus modal keluar, ketahanan pangan, dan kepercayaan publik. Negara yang rapuh secara fiskal akan sulit menjalankan kebijakan pembangunan, sementara negara yang terlalu ketat secara fiskal dapat kehilangan legitimasi sosial apabila rakyat merasa ditinggalkan.

4. Perdagangan Global: Dari Efisiensi Menuju Ketahanan

Perdagangan internasional dahulu dibangun di atas prinsip efisiensi: produksi dilakukan di lokasi termurah, rantai pasok dibuat panjang tetapi hemat biaya, dan perusahaan mengandalkan logistik global yang relatif stabil. Model ini menghasilkan barang murah, memperluas pasar, dan mempercepat industrialisasi di Asia. Namun model tersebut juga menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap jalur pelayaran, energi, semikonduktor, mineral kritis, dan negara pemasok tertentu.

Perang dagang, pandemi, gangguan pelabuhan, konflik geopolitik, serta persaingan teknologi menunjukkan bahwa rantai pasok global dapat menjadi sumber kerentanan. Karena itu, istilah seperti *reshoring*, *nearshoring*, *friend-shoring*, dan *China+1 strategy* semakin sering digunakan. Perusahaan dan negara tidak lagi hanya bertanya "di mana biaya paling murah?", tetapi juga "di mana risiko paling dapat dikendalikan?"

WTO memperlihatkan ambivalensi ini. Di satu sisi, perdagangan dunia masih tumbuh dan tidak mengalami deglobalisasi total. Di sisi lain, pertumbuhan perdagangan melambat dan semakin bergantung pada sektor-sektor strategis, terutama barang terkait AI dan elektronik. WTO mencatat bahwa perdagangan barang dunia pada 2025 tumbuh lebih cepat dari perkiraan karena lonjakan permintaan barang terkait AI, tetapi

pertumbuhan 2026 diperkirakan lebih lambat dan rentan terhadap guncangan energi serta konflik. ([World Trade Organization](#))

Pergeseran perdagangan ini penting bagi negara berkembang. Pada masa lalu, industrialisasi dapat dicapai melalui ekspor manufaktur padat karya. Kini jalur itu menjadi lebih sulit karena otomasi, standar lingkungan, tarif, persyaratan asal barang, dan kompetisi teknologi. Negara berkembang harus mencari strategi baru: bukan hanya masuk ke rantai pasok global, tetapi meningkatkan nilai tambah, membangun kompetensi teknologi, memperkuat logistik, dan menjaga standar keberlanjutan.

Bagi Indonesia, ini berarti hilirisasi tidak cukup dipahami sebagai larangan ekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi strategi pembelajaran industri: membangun kemampuan teknologi, riset, SDM, energi bersih, tata kelola lingkungan, dan jaringan pasar. Tanpa itu, hilirisasi dapat berubah menjadi ekstraksi baru yang hanya memindahkan lokasi pengolahan, tetapi tidak meningkatkan kemampuan nasional secara mendalam.

5. Geopolitik dan Kembalinya Negara Strategis

Salah satu perubahan paling penting dalam ekonomi politik kontemporer adalah kembalinya negara sebagai aktor strategis. Pada masa globalisasi liberal, negara sering dipandang sebagai penghambat pasar apabila terlalu banyak campur tangan. Kini pandangan itu berubah. Negara dituntut hadir untuk mengamankan pangan, energi, teknologi, kesehatan, pertahanan, data, dan infrastruktur kritis.

Kembalinya negara bukan berarti kembali ke proteksionisme lama secara penuh. Lebih tepat disebut sebagai munculnya *strategic state*: negara yang menggunakan kebijakan industri, subsidi, regulasi, investasi publik, dan diplomasi ekonomi untuk membangun kapasitas nasional. Amerika Serikat, Uni Eropa, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara lain menjalankan kebijakan industri dalam bentuk dukungan semikonduktor, energi bersih, kendaraan listrik, baterai, pertahanan, dan AI.

Namun negara strategis memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah positif: negara dapat mengoreksi kegagalan pasar, membangun infrastruktur, mempercepat inovasi, dan melindungi masyarakat rentan. Wajah kedua adalah negatif: negara dapat menjadi alat patronase, rente, korupsi, proteksi berlebihan, dan konsentrasi kekuasaan. Karena itu, pertanyaan utama bukan apakah negara boleh berperan, melainkan bagaimana peran negara dikendalikan oleh akuntabilitas, transparansi, evaluasi kinerja, dan partisipasi publik.

Dalam konteks geopolitik, ekonomi tidak lagi netral. Sanksi, kontrol ekspor, tarif, pembatasan investasi, keamanan data, dan standar teknologi menjadi instrumen kekuasaan. Negara yang terlalu bergantung pada satu pasar, satu mata uang, satu sumber energi, atau satu teknologi akan lebih rentan. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi prinsip baru ekonomi politik global.

6. Demokrasi, Populisme, dan Krisis Legitimasi

Dunia yang bergeser tidak hanya ditandai oleh perubahan ekonomi, tetapi juga oleh perubahan politik. Freedom House mencatat kebebasan global menurun selama 20 tahun berturut-turut hingga 2025; 54 negara mengalami penurunan hak politik dan kebebasan sipil, sementara hanya 35 negara mengalami perbaikan. ([Freedom House](#)) V-Dem juga menunjukkan stagnasi demokratisasi: hanya 18 negara atau sekitar 10% negara dunia yang sedang mengalami demokratisasi pada laporan 2026. ([V-Dem](#))

Kemunduran demokrasi sering berhubungan dengan ketidakpuasan ekonomi. Ketika kelas menengah merasa tertekan, pekerja merasa kehilangan keamanan, dan masyarakat melihat ketimpangan meningkat, kepercayaan terhadap institusi menurun. Dalam situasi demikian, populisme tumbuh dengan menawarkan jawaban sederhana terhadap masalah kompleks: menyalahkan elite, asing, imigran, globalisasi, bank sentral, media, atau lembaga internasional.

Funke, Schularick, dan Trebesch (2016) menunjukkan bahwa krisis keuangan sering diikuti oleh polarisasi politik dan menguatnya partai ekstrem. Temuan ini relevan untuk membaca masa kini. Ketika krisis ekonomi tidak segera diselesaikan secara adil, ia dapat berubah menjadi krisis demokrasi. Masyarakat tidak hanya menuntut pertumbuhan, tetapi juga keadilan, keterwakilan, dan rasa dihormati.

Masalahnya, demokrasi modern juga menghadapi disruptsi digital. Media sosial mempercepat informasi, tetapi juga mempercepat disinformasi. AI generatif dapat membantu pendidikan, riset, dan produktivitas, tetapi juga dapat menghasilkan manipulasi opini, *deepfake*, propaganda mikro, dan polarisasi. Dengan demikian, kualitas demokrasi masa depan akan sangat dipengaruhi oleh tata kelola ruang digital.

Demokrasi yang sehat membutuhkan ekonomi yang memberi harapan. Sebaliknya, ekonomi yang tangguh membutuhkan demokrasi yang menjaga akuntabilitas. Tanpa demokrasi, negara strategis mudah berubah menjadi negara patronase. Tanpa kapasitas ekonomi, demokrasi mudah berubah menjadi arena frustrasi sosial.

7. AI dan Ekonomi Digital: Produktivitas Baru, Ketimpangan Baru

Artificial intelligence menjadi salah satu kekuatan utama yang menggeser ekonomi politik dunia. AI dapat meningkatkan produktivitas melalui otomasi proses kerja, analisis data, riset ilmiah, desain produk, layanan pelanggan, pendidikan personal, deteksi risiko, dan optimalisasi rantai pasok. World Bank menyatakan bahwa AI berpotensi menjadi katalis pertumbuhan, terutama melalui peningkatan produktivitas jangka menengah, tetapi manfaatnya akan berbeda antarnegara tergantung kesiapan ekosistem dan kebijakan. Negara berkembang yang tidak mampu menyediakan ekosistem adopsi AI berisiko tertinggal lebih jauh. ([World Bank](#))

AI bukan hanya teknologi, melainkan infrastruktur kekuasaan. Negara dan perusahaan yang menguasai komputasi, data, model AI, semikonduktor, energi murah, dan talenta digital akan memiliki keunggulan besar. Karena itu, kompetisi AI adalah kompetisi ekonomi, politik, keamanan, dan budaya sekaligus. Di satu sisi, AI membuka peluang bagi negara berkembang untuk melompat melalui pendidikan digital, layanan kesehatan jarak jauh, pertanian presisi, dan administrasi publik cerdas. Di sisi lain, AI dapat memperlebar kesenjangan jika hanya dinikmati oleh perusahaan besar, negara maju, dan tenaga kerja berpendidikan tinggi.

Ekonomi digital juga memunculkan bentuk baru ketimpangan. UNCTAD mencatat bahwa pada 2024 jasa yang dapat dikirim secara digital menyumbang lebih dari 60% ekspor jasa negara maju, 44% di negara berkembang, dan hanya 15% di negara paling tertinggal. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#)) Ini menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan ruang netral. Ia membutuhkan infrastruktur broadband, pusat data, listrik stabil, regulasi data, keamanan siber, bahasa, pendidikan, dan kemampuan inovasi.

Bagi Indonesia, AI perlu dilihat sebagai agenda pembangunan nasional, bukan sekadar penggunaan aplikasi. Pertanyaannya bukan hanya "bagaimana memakai AI?", tetapi "bagaimana membangun kapasitas nasional agar AI meningkatkan produktivitas, bukan menggantikan manusia secara tidak adil?" Pendidikan tinggi, termasuk bidang manajemen, harus mengajarkan AI sebagai alat berpikir, alat analisis, alat inovasi, dan alat tata kelola. Namun AI harus ditempatkan dalam kerangka etika, akuntabilitas, dan nilai kemanusiaan.

8. Energi, Iklim, dan Mineral Kritis

Transisi energi menjadi medan baru ekonomi politik global. Dunia ingin mengurangi emisi karbon, tetapi masih bergantung pada energi fosil. Dunia ingin mempercepat kendaraan listrik, baterai, panel surya, dan turbin

angin, tetapi semua itu membutuhkan mineral kritis seperti nikel, litium, kobalt, tembaga, grafit, dan rare earth. IEA menekankan bahwa mineral kritis menjadi bagian penting dari transisi energi, sementara konsentrasi pasokan dapat meningkatkan kerentanan terhadap guncangan. ([IEA](#))

Di sinilah letak paradoks transisi energi. Energi bersih membutuhkan ekstraksi mineral. Jika tata kelolanya lemah, transisi energi dapat menciptakan kerusakan lingkungan, konflik lahan, ketimpangan wilayah, dan ketergantungan baru. Karena itu, transisi energi tidak boleh hanya menjadi agenda teknologi, tetapi juga agenda keadilan sosial dan ekologis.

Indonesia memiliki posisi strategis karena cadangan nikel dan potensi energi terbarukan. Namun posisi strategis tidak otomatis menghasilkan kemakmuran. Nilai tambah nasional tergantung pada kemampuan mengelola industri baterai, kendaraan listrik, energi bersih, standar ESG, riset material, daur ulang, dan perlindungan lingkungan. Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan mineral dapat berubah menjadi kutukan sumber daya.

Dalam perspektif ekonomi politik, energi adalah sumber kekuasaan. Negara yang mampu menyediakan energi murah, bersih, aman, dan stabil akan memiliki daya saing industri. Sebaliknya, negara yang tergantung pada impor energi mahal akan rentan terhadap inflasi, defisit transaksi berjalan, dan tekanan fiskal. Karena itu, kebijakan energi Indonesia harus menghubungkan ketahanan energi, transisi hijau, industrialisasi, dan perlindungan masyarakat miskin.

9. Arus Modal, FDI, dan Kerentanan Negara Berkembang

Globalisasi keuangan menciptakan peluang pembiayaan pembangunan, tetapi juga kerentanan. Arus modal dapat masuk cepat ketika investor optimis, tetapi dapat keluar cepat ketika risiko meningkat. Negara berkembang sering menghadapi dilema: membutuhkan investasi asing, tetapi harus menjaga stabilitas nilai tukar dan kedaulatan kebijakan.

UNCTAD memperkirakan FDI global naik 14% pada 2025 menjadi USD 1,6 triliun, tetapi peningkatan itu banyak berasal dari aliran melalui pusat keuangan global, sementara investasi riil tetap rapuh. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#)) Artinya, angka FDI global tidak selalu mencerminkan peningkatan investasi produktif di sektor riil. Negara berkembang harus membedakan antara arus modal yang menciptakan kapasitas produksi dan arus finansial yang hanya mencari keuntungan jangka pendek.

Tekanan utang juga meningkat. Ketika suku bunga global tinggi, negara berkembang menghadapi biaya pembiayaan yang lebih mahal. IMF mencatat utang publik global menuju 100% PDB pada 2029, sementara tekanan belanja meningkat untuk kebutuhan sosial, pertahanan, dan otonomi strategis. ([IMF](#)) Dalam konteks ini, disiplin fiskal bukan sekadar tuntutan teknokratik, melainkan syarat kedaulatan. Negara yang fiskalnya rapuh akan lebih mudah ditekan pasar dan lembaga kreditur.

Namun disiplin fiskal tidak boleh dimaknai sebagai penghematan membabi buta. Yang diperlukan adalah kualitas belanja: belanja yang memperkuat produktivitas, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, perlindungan sosial, dan transisi energi. Pemotongan belanja yang mengorbankan kapasitas manusia justru dapat melemahkan pertumbuhan jangka panjang.

10. Indonesia dalam Dunia yang Bergeser

Indonesia berada di tengah arus perubahan global ini. Sebagai ekonomi besar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki pasar domestik luas, bonus demografi, sumber daya alam, posisi maritim strategis, dan potensi ekonomi digital. Namun Indonesia juga menghadapi risiko: ketergantungan pada komoditas, tekanan nilai tukar, impor energi tertentu, defisit kualitas SDM, ketimpangan wilayah, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar.

IMF mencatat proyeksi pertumbuhan PDB riil Indonesia 2026 sebesar 5,0% dan inflasi konsumen 3,0%. ([IMF](#)) Angka ini menunjukkan ketahanan relatif, tetapi belum cukup untuk lompatan transformasional. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Pertumbuhan 5% dapat menjaga stabilitas, tetapi untuk naik kelas secara signifikan, Indonesia perlu memperbaiki produktivitas, kualitas pendidikan, inovasi industri, dan tata kelola investasi.

Pada Juni 2026, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah, menjaga inflasi dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, dan menarik aliran portofolio asing. BI juga menyebut pelemahan Rupiah dipengaruhi gejolak global, permintaan valuta asing domestik, dan arus keluar investasi portofolio asing. ([Bank Indonesia](#)) Ini memperlihatkan bahwa stabilitas makro Indonesia sangat terkait dengan dinamika global: energi, dolar AS, suku bunga, persepsi investor, dan kredibilitas kebijakan domestik.

Kehadiran Danantara sebagai instrumen investasi negara juga mencerminkan kembalinya negara strategis. Reuters melaporkan bahwa unit Danantara Investment Management menghimpun USD 1,5 miliar dalam debut obligasi dolar AS pada Juni 2026, dengan permintaan investor lebih dari USD 4,6 miliar. ([Reuters](#)) Fenomena ini memiliki dua makna. Pertama, investor global masih melihat peluang pada aset Indonesia. Kedua, pasar akan terus menilai kualitas tata kelola, transparansi, disiplin fiskal, dan arah kebijakan negara. Danantara dapat menjadi instrumen pembangunan produktif apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis proyek yang layak. Namun ia juga dapat menimbulkan risiko apabila menjadi alat ekspansi negara tanpa akuntabilitas memadai.

Indonesia perlu mengembangkan strategi ekonomi politik yang seimbang. Tidak cukup hanya membuka pasar; Indonesia harus membangun kapasitas nasional. Tidak cukup hanya memperkuat negara; Indonesia harus menjaga akuntabilitas demokratis. Tidak cukup hanya mengejar investasi; Indonesia

harus memastikan investasi menciptakan nilai tambah, pekerjaan layak, transfer teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

11. ASEAN dan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Dalam dunia yang terfragmentasi, ASEAN memiliki posisi penting sebagai kawasan penyeimbang. ASEAN bukan blok militer besar, tetapi memiliki kekuatan sebagai kawasan pertumbuhan, pasar konsumen, basis produksi, dan ruang diplomasi. Indonesia dapat menggunakan ASEAN sebagai platform untuk memperkuat stabilitas regional, diversifikasi rantai pasok, keamanan pangan, energi, ekonomi digital, dan tata kelola maritim.

Namun ASEAN juga menghadapi keterbatasan. Prinsip non-intervensi membuat respons terhadap krisis politik regional sering lambat. Perbedaan kepentingan antarnegara anggota juga membuat ASEAN sulit mengambil posisi tegas dalam rivalitas kekuatan besar. Karena itu, Indonesia perlu menjalankan diplomasi yang aktif tetapi realistis: memperkuat sentralitas ASEAN, menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan, tetapi tidak terjebak dalam ketergantungan tunggal.

Diplomasi ekonomi Indonesia harus diarahkan pada empat agenda. Pertama, memperkuat akses pasar dan investasi produktif. Kedua, membangun kerja sama teknologi dan talenta digital. Ketiga, memperkuat kerja sama energi bersih dan mineral kritis. Keempat, menjaga stabilitas maritim dan rantai pasok. Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memberi peluang besar dalam ekonomi maritim, logistik, perikanan, energi laut, dan konektivitas Indo-Pasifik.

12. Ketimpangan, Kelas Menengah, dan Kontrak Sosial Baru

Salah satu isu terpenting dalam ekonomi politik kontemporer adalah ketimpangan. Globalisasi dan teknologi menciptakan pemenang dan pihak yang tertinggal. Pemenangnya adalah mereka yang memiliki modal,

pendidikan tinggi, akses digital, jaringan global, dan kemampuan beradaptasi. Pihak yang tertinggal adalah pekerja berupah rendah, sektor informal, UMKM yang tidak terdigitalisasi, wilayah tertinggal, dan kelompok yang tidak memiliki akses pendidikan berkualitas.

Ketimpangan bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah ekonomi dan politik. Ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menurunkan mobilitas sosial, melemahkan permintaan domestik, meningkatkan kriminalitas, memperburuk kesehatan masyarakat, dan merusak kepercayaan terhadap demokrasi. Ketika masyarakat merasa sistem ekonomi tidak adil, mereka lebih mudah menerima narasi ekstrem.

Karena itu, dunia membutuhkan kontrak sosial baru. Kontrak sosial lama bertumpu pada asumsi bahwa pertumbuhan akan menetes ke bawah. Kenyataannya, pertumbuhan tidak otomatis inklusif. Kontrak sosial baru harus mencakup pendidikan sepanjang hayat, perlindungan sosial adaptif, akses kesehatan, perumahan layak, pekerjaan bermartabat, literasi digital, dan kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas.

Bagi Indonesia, kelas menengah memiliki peran strategis. Kelas menengah adalah basis konsumsi, stabilitas politik, pendidikan anak, pajak, dan inovasi sosial. Jika kelas menengah melemah akibat biaya hidup, cicilan, pendidikan mahal, pekerjaan tidak aman, dan tekanan digital, maka stabilitas sosial ikut terganggu. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus menjaga daya beli sekaligus meningkatkan produktivitas.

13. Tata Kelola: Antara Kapasitas Negara dan Akuntabilitas

Dalam dunia yang bergeser, kapasitas negara menjadi syarat utama. Negara harus mampu merancang kebijakan, mengumpulkan pajak, mengelola data, menegakkan hukum, membangun infrastruktur, mengawasi pasar, merespons krisis, dan melindungi warga. Namun kapasitas tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi otoritarianisme

teknokratik. Sebaliknya, demokrasi tanpa kapasitas dapat berubah menjadi populisme tanpa hasil.

Tata kelola yang dibutuhkan adalah tata kelola adaptif. Artinya, negara harus mampu belajar dari data, mengevaluasi kebijakan, memperbaiki kesalahan, dan melibatkan masyarakat. Kebijakan publik tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi proses pembelajaran kolektif.

Dalam konteks ekonomi politik Indonesia, reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, transparansi anggaran, pengadaan publik yang bersih, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti menjadi sangat penting. Negara strategis hanya akan berhasil apabila proyek strategis tidak menjadi ruang rente. Hilirisasi, Danantara, subsidi energi, program pangan, proyek infrastruktur, dan transformasi digital harus memiliki indikator kinerja yang jelas, audit independen, serta komunikasi publik yang jujur.

14. Skenario Dunia Kontemporer

Dunia yang bergeser dapat bergerak ke beberapa skenario.

Skenario pertama adalah fragmentasi keras. Dalam skenario ini, rivalitas geopolitik memburuk, perdagangan semakin dipersensitai, konflik energi berlanjut, inflasi tinggi, suku bunga tetap ketat, demokrasi melemah, dan negara berkembang semakin tertekan. Dunia menjadi lebih mahal, lebih curiga, dan lebih tidak stabil.

Skenario kedua adalah stabilisasi pragmatis. Negara-negara menerima bahwa globalisasi lama tidak dapat kembali sepenuhnya, tetapi tetap menjaga kerja sama terbatas dalam perdagangan, iklim, kesehatan, pangan, dan keuangan. Rantai pasok menjadi lebih beragam, tetapi tidak sepenuhnya terputus. AI dan energi bersih tetap tumbuh, tetapi diatur lebih hati-hati.

Skenario ketiga adalah transformasi inklusif. Dalam skenario ini, negara menggunakan teknologi, transisi energi, reformasi pendidikan, dan kerja sama regional untuk menciptakan pertumbuhan baru yang lebih adil. Demokrasi diperkuat melalui transparansi digital, literasi publik, perlindungan sosial, dan partisipasi warga. Ini adalah skenario paling diinginkan, tetapi juga paling membutuhkan kepemimpinan visioner dan institusi kuat.

Indonesia harus menyiapkan diri untuk ketiga skenario tersebut. Prinsipnya adalah ketahanan adaptif: mampu bertahan dalam tekanan, tetapi juga mampu berubah ketika peluang muncul.

15. Implikasi Strategis bagi Indonesia

Ada beberapa implikasi strategis yang dapat ditarik.

Pertama, Indonesia perlu memperkuat stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan pembangunan jangka panjang. Kebijakan moneter harus menjaga Rupiah dan inflasi, sementara kebijakan fiskal harus menjaga kredibilitas, kualitas belanja, dan perlindungan sosial.

Kedua, Indonesia harus membangun strategi industri berbasis nilai tambah. Hilirisasi perlu dihubungkan dengan teknologi, riset, SDM, energi bersih, dan pasar global. Keberhasilan hilirisasi diukur bukan hanya dari ekspor, tetapi dari kemampuan nasional.

Ketiga, Indonesia perlu menjadikan AI sebagai agenda pendidikan dan produktivitas nasional. Perguruan tinggi, sekolah vokasi, UMKM, birokrasi, dan sektor kesehatan harus dibantu agar mampu menggunakan AI secara etis dan produktif.

Keempat, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi dan pangan. Subsidi harus lebih tepat sasaran, sementara investasi energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, dan efisiensi energi harus dipercepat.

Kelima, Indonesia harus menjaga demokrasi dan kepercayaan publik. Pembangunan membutuhkan legitimasi. Legitimasi muncul dari keadilan, transparansi, partisipasi, dan hasil nyata.

Keenam, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi ASEAN dan Indo-Pasifik. Dalam dunia yang terbelah, Indonesia harus menjadi jembatan, bukan satelit. Posisi bebas aktif harus diterjemahkan ke dalam strategi ekonomi konkret: pasar, teknologi, energi, maritim, dan investasi.

16. Kesimpulan

Dunia kontemporer sedang bergeser dari era optimisme globalisasi menuju era ketidakpastian strategis. Pergeseran ini tidak berarti globalisasi berakhir, tetapi globalisasi berubah bentuk. Efisiensi tidak lagi menjadi satu-satunya prinsip; ketahanan, keamanan, keberlanjutan, dan legitimasi sosial menjadi sama pentingnya.

Ekonomi global menghadapi pertumbuhan yang lebih lambat, tekanan fiskal, inflasi yang sensitif terhadap energi, dan arus modal yang volatil. Politik global menghadapi kemunduran demokrasi, populisme, polarisasi, dan disinformasi. Teknologi membuka peluang produktivitas, tetapi juga memperbesar ketimpangan jika tidak diatur. Transisi energi memberi harapan ekologis, tetapi juga menciptakan kompetisi mineral dan risiko lingkungan baru.

Bagi Indonesia, dunia yang bergeser menuntut kebijakan yang lebih cerdas, adaptif, dan berani. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengeksport komoditas, pasar konsumen, atau penerima arus modal. Indonesia harus menjadi negara pembelajar: membangun industri, memperkuat SDM, menguasai teknologi, menjaga lingkungan, memperdalam demokrasi, dan memperluas keadilan sosial.

Pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh negara yang paling kuat secara militer atau paling besar secara ekonomi saja, melainkan oleh

negara yang paling mampu belajar, beradaptasi, menjaga kepercayaan publik, dan mengubah krisis menjadi momentum pembaruan.

Glossarium

AI / Artificial Intelligence: Teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas kognitif seperti analisis, prediksi, pengenalan pola, bahasa, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Akuntabilitas: Kewajiban pemerintah, organisasi, atau pemimpin untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan serta hasil kebijakannya.

Arus Modal: Pergerakan dana lintas negara dalam bentuk investasi langsung, portofolio, pinjaman, atau instrumen keuangan lainnya.

Deglobalisasi: Proses melemahnya integrasi ekonomi global, biasanya ditandai oleh turunnya perdagangan, investasi lintas negara, atau kerja sama multilateral.

Fragmentasi Ekonomi: Terpecahnya sistem ekonomi global ke dalam blok, standar, aturan, atau rantai pasok yang berbeda karena faktor geopolitik atau kebijakan nasional.

Geopolitik: Hubungan antara kekuasaan politik, wilayah, sumber daya, keamanan, dan strategi antarnegara.

Hilirisasi: Strategi meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan domestik sebelum diekspor atau digunakan dalam industri lanjutan.

Ketahanan Ekonomi: Kemampuan ekonomi untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari guncangan seperti krisis energi, pandemi, konflik, atau volatilitas keuangan.

Kontrak Sosial: Kesepakatan implisit antara negara dan warga mengenai hak, kewajiban, perlindungan, dan legitimasi kekuasaan.

Mineral Kritis: Mineral yang penting bagi industri strategis dan transisi energi, seperti nikel, litium, kobalt, tembaga, grafit, dan rare earth.

Negara Strategis: Negara yang aktif membangun kapasitas ekonomi, teknologi, industri, energi, dan keamanan melalui kebijakan publik yang terarah.

Populisme: Gaya politik yang mengklaim mewakili "rakyat" melawan "elite", sering kali menyederhanakan masalah kompleks dan memanfaatkan ketidakpuasan sosial.

Rantai Pasok Global: Jaringan produksi, distribusi, logistik, dan perdagangan yang melibatkan banyak negara dalam menghasilkan barang atau jasa.

Transisi Energi: Perubahan sistem energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju sumber energi rendah karbon dan terbarukan.

Weaponized Interdependence: Kondisi ketika saling ketergantungan ekonomi global digunakan sebagai alat tekanan politik atau geopolitik.

Daftar Pustaka

Catatan: DOI dicantumkan untuk sumber akademik yang memilikinya. Laporan lembaga internasional umumnya tidak memiliki DOI dan dicantumkan sebagai laporan institusional.

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. DOI: 10.1257/aer.91.5.1369
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188–2244. DOI: 10.1086/705716
- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465–490. DOI: 10.2307/2118470
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States. *American Economic Review*, 103(6), 2121–2168. DOI: 10.1257/aer.103.6.2121
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229. DOI: 10.1257/aer.109.4.1197
- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2019). Artificial intelligence and the modern productivity paradox. In A. Agrawal, J. Gans, & A. Goldfarb (Eds.), *The economics of artificial intelligence: An agenda*. University of Chicago Press. DOI: 10.7208/chicago/9780226613475.003.0001
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), 42–79. DOI: 10.1162/isec_a_00351
- Funke, M., Schularick, M., & Trebesch, C. (2016). Going to extremes: Politics after financial crises, 1870–2014. *European Economic Review*, 88, 227–260. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2016.03.006
- International Monetary Fund. (2026). *World economic outlook: Global economy in the shadow of war*. IMF.
- International Monetary Fund. (2026). *Fiscal monitor: Fiscal policy under pressure—High debt, rising risks*. IMF.

North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. DOI: 10.1257/jep.5.1.97

OECD. (2026). *OECD economic outlook, volume 2026 issue 1*. OECD Publishing.

Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. DOI: 10.1126/science.1172133

Piketty, T., & Saez, E. (2003). Income inequality in the United States, 1913–1998. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 1–39. DOI: 10.1162/00335530360535135

Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments? *Journal of Political Economy*, 106(5), 997–1032. DOI: 10.1086/250038

Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. *Journal of International Business Policy*, 1, 12–33. DOI: 10.1057/s42214-018-0001-4

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165. DOI: 10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85

UN Trade and Development. (2026). *Global investment trends monitor*, No. 50. UNCTAD.

V-Dem Institute. (2026). *Democracy report 2026: Unraveling the democratic era?* University of Gothenburg.

World Bank. (2026). *Global economic prospects*. World Bank.

World Trade Organization. (2026). *Global trade outlook and statistics: March 2026*. WTO.

Rudy C Tarumingkeng: Dunia yang Bergeser -- Kajian Ekonomi dan Politik Kontemporer

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 12 Juni 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a2b8882-ddc4-83ec-b5b1-f4776c5b22ed>